



Periode Akhir Revolusi Fisik di Bali, 1946-1949

Ketut Sedana Arta,^{1*} I Wayan Putra Yasa,¹ I Made Pageh,¹ I Wayan Pardi¹

¹Universitas Pendidikan Ganesha; ketut.sedana@undiksha.ac.id

*Korespondensi

Dikirim: 21-09-2023; Direvisi: 29-04-2024; Diterima: 29-04-2024; Diterbitkan: 02-05-2024

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Puputan Margarana dan dampaknya terhadap revolusi fisik di Bali, baik dilihat dari segi militer maupun psikologis serta untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas taktik dan strategi perjuangan di Bali pasca Puputan Margarana. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Puputan Margarana adalah menimbulkan kegoncangan psikologis bagi para pejuang yang ada di daerah Buleleng yang menyebabkan kesedihan, sangat terpukul karena kehilangan pucuk pimpinan dengan gugurnya Ngurah Rai beserta stafnya. Perubahan strategi Revolusi fisik di Bali pasca Puputan Margarana adalah adanya reorganisasi terhadap MBU-DPRI dan lahirnya MBI, serta berbagai tindakan persuasive untuk melaksanakan program minimum Banyuning, infiltrasi pengaruh DPRI terhadap organ-organ pemerintah, dan melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap mereka yang nyata-nyata memihak NICA. Karena telah tercapai persetujuan Renville tahun 1948 maka perubahan perjuangan di Buleleng kemudian dikenal dengan istilah penurunan yang merupakan cap tersembunyi dan penyerahan yang merupakan cap resmi oleh Wijakusuma dan para pimpinan teras MBU-DPRI.

Kata Kunci: penurunan; penyerahan; Puputan Margarana; revolusi fisik

Abstract: This research aims to investigate Puputan Margarana and its impact on the physical revolution in Bali, both from a military and psychological perspective, and then to gain a clearer understanding of the tactics and strategies of resistance in Bali following the Puputan Margarana. This study employs historical methods encompassing heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The research findings indicate that the impact of Puputan Margarana resulted in psychological turmoil for the fighters in the Buleleng region, leading to sadness and a profound sense of loss due to the fall of Ngurah Rai and his staff. The post-Puputan Margarana physical revolution in Bali witnessed the reorganization of MBU-DPRI and the emergence of MBI, along with various persuasive actions to implement the minimum Banyuning program, the infiltration of DPRI's influence into government organs, and acts of violence against those openly supportive of NICA. With the achievement of the Renville Agreement in 1948, the shift in resistance in Buleleng came to be known as the "*penurunan*" (covert withdrawal) and "*penyerahan*" (official surrender), as orchestrated by Wijakusuma and the core leaders of MBU-DPRI.

Keywords: physical revolution; Puputan Margarana; surrender; withdrawal



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa sejarah yang menjadi ingatan kolektif bangsa. Peristiwa tersebut setiap tahun diperingati sebagai hari besar nasional yang diisi dengan berbagai acara seperti pesta rakyat, pidato kenegaraan, pidato politik, upacara pengibaran bendera, dan kegiatan lainnya untuk memeriahkan kemerdekaan. Upacara hari kemerdekaan itu mengandung pesan yang mendalam agar bangsa Indonesia sebagai entitas politik, sosial, dan budaya selalu menjaga dan merawat nilai-nilai proklamasi yang diperjuangkan secara bersama-sama (Nugroho, 2011)

Kemerdekaan Indonesia didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, dari penyiar radio Domei, para pemuda yang menyebarkan berbagai berita melalui pamflet, koran, dan berita yang dibawa langsung oleh para gubernur yang ditunjuk oleh sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Gubernur Sunda Kecil yakni Mr. I Gusti Ketut Pudja menyebarkan berita proklamasi secara langsung. Beliau kembali ke Singaraja sebagai Gubernur Sunda Kecil pada tanggal 23 Agustus 1945 dengan membawa dua surat yang berisi keputusan terkait kebenaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sebuah mandat pengangkatan Ida Bagus Putra Manuaba menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia daerah (KNID) Sunda Kecil. Kedua keputusan ini disampaikan kepada *cokan* atau kepala pemerintahan Jepang tertinggi di Sunda Kecil yang masih menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di Daerah Bali. Namun, berita proklamasi sendiri sebenarnya telah diterima oleh Ida Anak Agung Gede Agung melalui siaran radio tanggal 17 Agustus 1945 (Agung, 1985a; Agung, 1993). Berita proklamasi juga tersebar di Bali berkat adanya kerjasama antara pemuda Bali dengan pemuda Jawa sehingga tersebar di Bali dengan lebih cepat.

Masyarakat Bali pada umumnya sangat mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, namun ada sebagai kaum elit Bali justru bersikap sebaliknya karena beberapa alasan, salah satunya kaum elite tersebut sudah merasa nyaman berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Kenyataan tersebut sesuai dengan pemikiran dari (Ricklefs, 1992) bahwa proklamasi kemerdekaan membawa konsekuensi-konsekuensi yang panjang, dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serva dipaksakan oleh kekuatan asing hilang secara tiba-tiba. Maka yang terjadi kemudian bukan suatu bangsa baru yang serasi melainkan suatu pertarungan sengit antarkekuatan sosial yang bertentangan yang disebut zaman revolusi, seperti menawarkan hal-hal baru seperti anti kolonial, anti feodal, kebebasan, dan egalitarianisme, juga memunculkan kelompok-kelompok yang mendukung revolusi dan menentang antara kekuatan perjuangan bersenjata dan diplomasi, antara pemikiran generasi tua dan generasi muda, kelompok kiri dan kanan, kekuatan agama dan sekuler, dan sebagainya.

Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia menghadapi musuh sebenarnya, yakni NICA yang berusaha mencengkramkan kuku kolonialismenya kembali di Indonesia, termasuk Bali. Pendaratan pasukan sekutu di Pelabuhan Benoa terjadi tanggal 18 Februari 1946 dengan tugas melucuti tentara Jepang, serta memulihkan keamanan dan ketertiban, menghimpun keterangan tentang kejahatan perang (Arta, 2015). Kedatangan tentara sekutu di

Indonesia termasuk di Bali sambil membonceng tentara NICA's bermaksud untuk mengembalikan jajahannya ke tangan pemerintah Hindia Belanda yang menimbulkan reaksi berbeda dari kalangan eliten raja dan pihak republik. Para pemuda merespon kedatangan sekutu dan NICA dengan membentuk berbagai organisasi kepemudaan. Organisasi-organisasi yang dimaksud adalah Angkatan Muda Indonesia (AMI), Ikatan Siswa Sekolah Menengah (ISSM), Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang anggotanya dipilih dari pemuda didikan PETA, Heiho, Prayoda, yang pembentukannya dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai (Bali, 1980)

Pembentukan BKR di Bali bersamaan dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia untuk Sunda Kecil, pembentukan BKR bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Bali serta untuk mempertahankan kemerdekaan. Untuk daerah Buleleng BKR dipimpin oleh Made Putu, di Denpasar dipimpin oleh I Nyoman Pugeg. Namun dengan adanya maklumat tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sehingga BKR yang ada di Bali juga melebur ke dalam TKR. Pembentukannya penting tidak saja untuk menjaga keamanan dan ketertiban, namun juga mempertahankan kemerdekaan yang dibuktikan dari adanya berbagai bentrokan senjata antara rakyat dengan tentara sekutu dan NICA, serta adanya usaha-usaha untuk pelucutan senjata tentara Jepang yang membuat keadaan Bali sangat genting.

Keadaan yang demikian menyebabkan di Bali terjadi revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Politik diplomasi yang dilaksanakan diiringi juga dengan politik perjuangan bersenjata seperti halnya dilakukan oleh pasukan Ciung Wanara dibawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Perjuangan menghadapi kolonial Belanda di Bali dilandasi kepercayaan bahwa mati di medan perang jaminannya adalah sorga, tindakan heroik melawan Belanda ditunjukkan dengan adanya puputan seperti Puputan Klungkung, Puputan Badung dan Puputan Jagaraga. Konsep puputan itu memiliki makna politik dan agama, dalam pandangan (Ardana, 2013) menjelaskan bahwa secara politik mengandung makna kekalahan tidak harus disertai dengan penyerahan, tetapi harus diikuti dengan semangat perang sampai wafat di medan perang. dalam konteks agama, mengandung arti orang yang gugur dalam peperangan akan masuk sorga. Kepercayaan ini juga melandasi perjuangan revolusi fisik di Bali yang ditandai dengan adanya perang Puputan Margarana yang menyebabkan semua pasukan Ciung Wanara gugur sebagai kusuma bangsa.

Revolusi fisik di Bali termasuk Puputan Margarana ternyata membawa dampak dalam berbagai aspek, seperti yang dikemukakan Dika Restu Ayuningtyas, R. Suharso dan Ibnu Sodik bahwa selama revolusi fisik berlangsung antara tahun 1945-1950 Indonesia berada dalam kondisi darurat perang. Kondisi ini membawa pengaruh dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, ketidakstabilan sosial politik melanda seluruh wilayah Indonesia (Suharso, 2016). Kondisi ini juga terjadi di Bali, sehingga terjadi kegentingan-kegentingan perjuangan pasca terjadinya Puputan Margarana, terjadi perdebatan pasca ditandatanganinya perjanjian Renville, ada yang pro dan ada yang kontra terhadap perjanjian tersebut, yang kontra melanjutkan perjuangan melalui strategi perang gerilya. Namun keadaan berubah setelah adanya surat- menyurat antara Ketut Nada dan Putu Wenten Tanaya dengan Nur Rai salah satu

staf MBU yang masih bergerilya tertanggal 7 Februari 1948 yang intinya mengajak para pemuda yang masih bergerilya untuk turun gunung untuk ikut serta membangun Republik Indonesia Serikat. kembalinya para pejuang dari daerah gerilya menimbulkan tafsir berbeda dari tokoh-tokoh perjuangan, karena ada yang menganggap tindakan MBU dianggap penurunan, namun ada yang menganggap penyerahan (Ardika, Paramartha, dan Wirawan, 2013)

Revolusi fisik di Bali mempunyai nilai-nilai sejarah yang layak diangkat sebagai sumber belajar sejarah lokal. dengan meminjam pendapat Widja (1991) bahwa sejarah lokal adalah suatu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas yang meliputi suatu lokalitas tertentu. Dijadikannya revolusi fisik sebagai sumber belajar sejarah juga mengacu pada silabus perkuliahan sejarah lokal yakni Kompetensi Dasar tentang arti penting sejarah lokal dan penelitian dan penulisan sejarah lokal. Dengan demikian mahasiswa memahami berbagai peristiwa sejarah lokal disekitar wilayahnya sehingga bisa nantinya menghasilkan sejarah lokal yang kritis analitis.

Penulisan tentang Bali pada masa revolusi fisik (1945-1949) tampaknya sudah banyak ada yang melakukan, hal ini dapat dilihat dari kajian yang dilakukan oleh Pendit (1977), Depdikbud (1978), Kemudian Nasution (1978) yang menulis sebelas jilid perang kemerdekaan Indonesia yang didalamnya juga banyak memuat revolusi fisik yang ada di Bali. Tulisan Agung (1985) mengupas tentang Bali terutama pada masa Republik Indonesia Serikat. Informasi tentang revolusi fisik di Bali juga banyak dimuat oleh koran Bali Post setiap ada perayaan kemerdekaan Indonesia. Walaupun penulisan tentang revolusi fisik di Bali telah melimpah, namun celah untuk meneliti peristiwa sejarah secara sinkronis masih bisa dikembangkan secara lebih lanjut, atau bisa dikatakan meneropong peristiwa sejarah dari dimensi-dimensi tertentu. Tulisan-tulisan tersebut hanya membahas secara selintas tentang Puputan Margarana, namun tidak mengkaji secara mendalam Puputan Margarana dan dampaknya terhadap revolusi fisik di Bali, baik dilihat dari segi militer maupun psikologis serta belum menggambarkan taktik dan strategi perjuangan di Bali pasca Puputan Margarana.

Dilihat dari urgensinya, secara empiris dan kontekstual akademik, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menganalisis strategi perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan MBU dalam rangka merespon hasil-hasil perjuangan diplomasi melalui berbagai perjanjian seperti perjanjian Linggarjati tahun 1947, perjanjian Renville tahun 1948, perjanjian Roem-Royen tahun 1949, dan perjanjian KMB tahun 1949 yang disatu sisi isinya merugikan posisi Republik Indonesia dan militer, namun di sisi lain harus mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga perlu ditelusuri bukti-bukti sejarah, apakah kembalinya para pejuang dari medan gerilya adalah penyerahan atau merupakan penurunan sebagai bentuk dukungan pada politik diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah atau historis. Metode sejarah adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji peristiwa di masa yang lampau dengan menggunakan seperangkat peraturan atau prinsip yang bersifat sistematis yang meliputi heuristik, kritik (interen maupun eksteren), interpretasi dan historiografi (Anis, 2023).

Heuristik yakni menemukan atau mengumpulkan sumber yakni dengan mengumpulkan berbagai catatan-catatan perjuangan yang ditulis oleh pelaku sejarah dalam berbagai buku perjuangan serta mengadakan wawancara dengan keluarga pejuang di Tabanan dan Buleleng, arsip-arsip yang ada di Museum Margarana, serta data monografi desa Marga, foto-foto pejuang. heuristik dilakukan dengan mengadakan observasi di lokasi terjadinya Puputan Margarana yang dilakukan bulan Setember tahun 2023. Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber yakni dengan mengkroscek data catatan perjuangan yang dituangkan dalam buku dengan hasil wawancara dengan keluarga pejuang. Selain itu dilakukan seleksi terhadap berbagai arsip yang diberikan, foto-foto tokoh pejuang, serta catatan lapangan untuk dijadikan sumber menjawab rumusan masalah penelitian. Kritik internal dilakukan terhadap isi catatan-catatan pejuang yang memiliki kemiripan dan perbedaan terhadap proses jalannya revolusi di Tabanan dan Buleleng sehingga didapatkan validitas data sejarah. Disamping itu dilakukan triangulasi hasil catatan wawancara beberapa keluarga pejuang sehingga data yang dihasilkan semakin valid. Langkah selanjutnya dengan melakukan interpretasi dengan telaah kritis sesuai dengan pendekatan sosial politik untuk membantu membuat narasi sosial politik terhadap dampak Puputan Margarana serta strategi revolusi fisik pasca Puputan Margarana. Interpretasi dilakukan untuk menghasilkan cerita sejarah dari fakta-fakta yang sudah dikumpulkan melalui wawancara maupun analisis dokumen dengan menggunakan model analisis, yakni menguraikan data secara induktif sehingga dapat dibuat kesimpulan. Langkah terakhir adalah historiografi, yakni melakukan penulisan sejarah secara kritis analitis yang dimulai dari latarbelakang Puputan Margarana dan dampaknya, kemudian membahas taktik dan strategi perjuangan di Bali pasca Puputan Margarana.

Hasil Penelitian

Puputan Margarana dan Dampaknya Terhadap Revolusi Fisik di Bali

Pada bulan Juli 1946, ketika pasukan *Long March* tiba di Desa Galungan yakni pada masa mereka telah kembali dari Gunung Agung. Gusti Ngurah Rai mengadakan pertemuannya dengan stafnya, untuk menyusun taktik dan strategi baru. Dalam pertemuan ini, akhirnya diputuskan bahwa komandan-komandan pasukan beserta anak buahnya diperintahkan kembali ke daerahnya masing-masing untuk melanjutkan perang gerilya. Kemudian diputuskan pula bahwa daerah Tabanan ditetapkan sebagai basis pertahanan MBU-DPRI, mengingat daerah ini cocok untuk medan Perang Gerilya (Tirtayasa, 1985). Hal ini tampaknya, tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan yakni rakyat yang bersedia membantu dan juga keadaan geografis yang menunjang misalnya tidak banyak jalan raya, banyak gunung dan bukitnya, banyak hutan dan belukarnya (Nasution, 1980). Ditambah lagi dengan kesuburan tanahnya, sehingga mampu menunjang kebutuhan logistik. Di samping itu, keputusan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan pasukan Komando yang diberinama Ciung Wanara yang bertugas sebagai pengawal markas.

Dengan adanya keputusan tersebut, maka mulailah pasukan yang ikut *Long March* memencar ke daerahnya masing-masing. Namun masalah yang belum terpecahkan ialah kekuatan senjata di Bali sangat minim, juga persediaan amunisi untuk perang jangka panjang.

Karena itu, pejuang di Bali terlalu kerdil jika dibandingkan dengan tentara NICA yang memiliki perlengkapan modern, militer yang professional dan juga telah banyak pengalaman dalam peperangan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pada waktu *Long March* Ngurah Rai telah memerintahkan kepada Maha Dewa untuk berangkat ke Jawa tidak saja melaporkan situasi di Bali melainkan juga meminta bantuan baik dalam bentuk senjata maupun tenaga. Usaha ini mengalami kegagalan, karena Maha Dewa ditangkap oleh tentara NICA di daerah Badung. Kemudian Ngurah Rai juga mencoba mengirim utusan ke Jawa lewat Bali Utara tetapi juga mengalami kegagalan karena blockade tentara NICA sulit ditembus. Sebab itulah kekurangan persenjataan masih tetap dirasakan sebagai faktor yang sangat mengganggu perjuangan di Bali.

Untuk memecahkan masalah kesulitan persenjataan itu, maka cara yang termudah tentu dengan memanfaatkan berbagai jenis senjata tradisional yang sudah lazim dikenal di Bali. Kemudian cara lain yang cukup menarik ialah dengan memakai tipu daya yakni menggunakan mitraliur buatan dari bambu yang fungsinya hanya untuk meramaikan suara tembakan, dan sekaligus menakut-nakuti musuh terutama sekali di malam hari. Cara seperti ini, misalnya dipakai oleh staf Brahma Wisnu di Buleleng Barat (Tirtayasa, 1985). Minimnya persenjataan itu, tentu tidak boleh sampai diketahui oleh rakyat karena sering terjadi kalau para pemuda itu muncul di tengah-tengah rakyat mereka, mereka melakukannya secara bergilir sehingga semuanya kelihatan membawa senjata padahal senjata yang dipamerkan hanyalah senjata dari itu ke itu saja. Ngurah Rai sebagai pimpinan MBU-DPRI, tentu belum merasa mantap perjuangannya kalau hanya mengandalkan diri pada persenjataan yang minim dan tipu daya seperti itu. Sebab dalam penyelesaian perang mungkin tidaklah sangat menentukan. Karena itulah, Ngurah Rai tetap menginginkan tambahan senjata tidak saja dari Jawa tetapi juga usaha-usaha lainnya misalnya meramps senjata dari tangan musuh. Hal inilah yang menyebabkan Ngurah Rai dengan anak buahnya melakukan perbuatan nekad yaitu merampas senjata dari tangan NICA di Tabanan. Kegiatan ini berjalan sukses sehingga Ngurah Rai dan anak buahnya bisa memiliki persenjataan yang berlimpah. Ngurah Rai memiliki rencana untuk menyerahkan senjata itu kepada para pejuang lainnya dan untuk itu dia sudah menghubungi Ida Bagus Tantra di daerah Badung. Berita tersebut diterima oleh Ida Bagus Tantra pada tanggal 20 November 1946 pukul 13.00, namun untuk menghubungi Ngurah Rai dengan anak buahnya ternyata menjalani kesulitan sehingga kelebihan senjata yang tidak bisa diibahkan ke tempat lain (Tantra, 1981).

Pihak tentara NICA tentu tidak membiarkan Ngurah Rai beserta anak buahnya berkeliaran dengan persenjataan yang lengkap. Selain itu, tentara NICA juga merasa terpukul dan terhina karena persenjataanya berhasil dirampas, bahkan martabatnyapun bisa menurun di mata masyarakat Bali. Karena itulah Panglima Tentara Belanda di Bali yakni *Overste* Ter Neku memerintahkan kepada anak buahnya agar merampas kembali persenjataan itu dan sekaligus membasmis Ngurah Rai beserta anak buahnya (Agung, 1985). Timbullah kemudian pertempuran hebat di Margarana. Dalam pertempuran ini Tentara NICA tidak saja mengandalkan dari pada kekuatan angkatan daratnya melainkan dibantu pula angkatan udaranya, lengkap dengan pesawat pembom atau pesawat tempurnya. Dalam peperangan ini, kemenangan berada di pihak tentara NICA. Sedangkan Ngurah Rai dengan anak buahnya tidak

ingin menyerah dan sesuai dengan semangat “Puputan” terus memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Dalam pertempuran ini, Ngurah Rai beserta stafnya seperti Mayor Wisnu, Mayor Debes, Mayor Sugianyar dan Letnan Dwindaa beserta semua pasukannya gugur dalam medan laga. Jumlah korban sekitar 96 orang yang gugur (Pendit, 1954). Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 November 1946, termasuk pertempuran terbesar yang pernah terjadi di Bali selama tentara NICA menduduki pulau Bali.

Dengan gugurnya Ngurah Rai beserta stafnya maka Tentara Republik Indonesia di Bali kehilangan opsir-opsirnya yang terkemuka sehingga dengan demikian melumpuhkan perjuangan militer di Bali yang tentunya memiliki akibat fatal untuk kelanjutan pertempuran di Bali melawan Belanda (Agung, 1985). Komentar senada dikemukakan pula oleh Nasution (1968) yang menyatakan bahwa hanculah induk resimen Sunda Kecil dan gugurlah pula komandannya Letnan Ngurah Rai. Hal ini merupakan pukulan yang terhebat bagi pihak kita selama perjuangan di Bali. Komentar ini tampaknya tidaklah berlebihan, sebab gugurnya Ngurah Rai dan stafnya tidak saja berarti TKR atau MBU-DPRI kehilangan sejumlah personal melainkan persenjataan yang dimilikinya secara otomatis berhasil pula dirampas kembali oleh tentara NICA. Sebab itulah menurut Agung (1985) bahwa setelah “Puputan Margarana”:

“Tidak dapat disangkal bahwa setelah terjadinya peristiwa ini tentara Belanda di Bali dapat mengkonsolidasikan kedudukannya yang tentunya memberi peluang kepada pemerintah Belanda untuk menormalisasi keadaan Bali oleh karena tidak ada lagi kekuatan militer Republik Indonesia yang dapat menghalang-halangnya secara teratur”.

Di samping itu, gugurnya Ngurah Rai dan stafnya secara psikologis mempengaruhi pula para pejuang di Bali. Semula memang banyak yang tidak percaya terhadap kebenarannya berita peristiwa tersebut, sebab mereka curiga bahwa hal itu hanyalah semata-mata isu yang disebarluaskan oleh NICA dengan mata-matanya dengan maksud mengacaukan keadaan dan melemahkan semangat perjuangan rakyat di Bali. Namun, bisa pula terjadi ketidakpercayaan itu timbul karena tindakan Ngurah Rai beserta stafnya melakukan tindakan yang nekat sebab perang gerilya senantiasa menghindari suatu pertempuran terbuka dan lebih mementingkan suatu taktik hit dan run. Pasukan itu, setelah mengadakan pukulan menghilang untuk menyiapkan diri mengulangi pukulan bila saat yang tepat sudah tiba (Agung, 1985b).

Para pejuang di daerah Badung pada sore hari tanggal 20 November 1946 sudah ada yang mengetahui tentang gugurnya Ngurah Rai beserta stafnya. Demikian misalnya Tantra (1981) menuturkan; “Tanggal 20 November 1946 sore Pak Rai cs gugur. Saya menerima laporan itu lengkap dengan nama-nama yang gugur. Saya kurang percaya dan menyuruh mengadakan penyelidikan ulang. Sore itu pula saya dengan saudara Jojol pergi menuju Desa Penarungan. Tanggal 21 November 1946 pagi-pagi saya menerima hasil penyelidikan ulang yang tidak ada perubahan dengan laporan kemarin; “Sedangkan untuk daerah Buleleng pagi-pagi tanggal 21 November 1946, kapal capung milik Belanda telah berputar-putar terutama sekali di daerah hutan dan perbukitan sambil menyebarkan pamphlet-pamflet yang memuat berita tentang “Puputan Margarana” beserta tewasnya Ngurah Rai dan stafnya. Kemudian para pemuda diharapkan supaya secepatnya menyerahkan diri. “Tetapi para pemuda tetap tidak percaya dengan bunyi pamflet-pamflet itu, yakin itu hanya tipuan belaka. Pemuda-pemuda Buleleng

tidak ada yang terpengaruh dengan seru-seruan NICA itu, malahan perjuangan terus ditingkatkan andai kata berita itu benar karena masih banyak pemimpin-pemimpin lainnya yang sanggup menggantikannya. Seperti pepatah mengatakan “Patah Tumbuh hilangnya berganti”. Hilangnya satu akan muncul seribu lagi” (Tirtayasa, 1985).

Akhirnya baru pada tanggal 25 November, daerah Buleleng secara positif menerima berita tentang “Puputan Margarana” yang disampaikan langsung oleh penghubung dari Tabanan. Dengan demikian lenyaplah keraguan yang dialami oleh para pejuang di Buleleng. Dengan adanya kepastian bahwa Ngurah Rai beserta stafnya memang gugur, maka para pejuang atau masyarakat Bali tentunya sangat bersedih. Bahkan mungkin pula sangat terpukul. Karena meskipun banyak tokoh yang dapat menggantikan kedudukannya, namun peristiwa itu telah mengakibatkan di Bali kehilangan opsir-opsir terkemuka (Agung, 1985) dan juga sekaligus lenyapnya persenjataan padahal senjata sangat diperlukan tetapi jumlahnya sangat langka di Bali. Sebagai ungkapan perasaan duka itu, Ida Bagus Tantra (1981) mengatakan “Bagaimanapun saya tetap berduka, tetapi ini tidak berarti saya berhenti berjuang”. Di Buleleng para pemuda menilai peristiwa itu sebagai sesuatu yang sangat mengejutkan dan menyedihkan. Kemudian sebagai ungkapan terhadap perasaan itu, mereka turut berkabung dan para pemuda mengibarkan bendera setengah tiang di hutan (Tirtayasa, 1985).

Taktik dan Strategi Perjuangan di Bali Pasca Puputan Margarana

1. Reorganisasi terhadap MBU-DPRI dan lahirnya MBI

Pada tanggal 25 November 1946 diadakanlah rapat di Desa Buah Tabanan yang dihadiri oleh Wijakusuma, Ida Bagus Tantra, Binder, Cokorda Agung dan beberapa pemimpin dari daerah setempat. Karena jarak waktu antara rapat dengan “Puputan Margarana” terlalu pendek, itulah tampaknya yang menyebabkan rapat tersebut hanya dihadiri oleh peserta yang sangat terbatas. Sebab itu, reorganisasi yang mendasar terhadap MBU-DPRI tentunya tidak bisa dilakukan karena terbatasnya pada penggantian pejabat yang lowong karena gugur dalam “Puputan Margarana”.

Berdasarkan prinsip itu, maka dalam rapat itu diputuskanlah beberapa hal (Tantra, 1981) yakni:

1. Markas Besar Badung dan Tabanan setuju untuk mengangkat Wijakusuma sebagai pimpinan MBU-DPRI Sunda Kecil menggantikan Ngurah Rai.
2. Ida Bagus Tantra diangkat sebagai pimpinan Markas Besar Tabanan menggantikan Pak Putih almarhum.
3. Sebagai pengganti Ida Bagus Tantra yang semula adalah Pimpinan Markas Besar Badung diangkat Cokorda Agung (Kresna).
4. Ida Bagus Tantra secepatnya harus berangkat ke Jawa untuk memberikan laporan selengkapnya tentang perkembangan situasi di Bali, termasuk gugurnya Ngurah Rai beserta stafnya. Untuk sementara waktu Markas Besar Tabanan dipimpin oleh Binder.

Sesuai dengan keputusan rapat itu (butir 4), Ida Bagus Tantra lalu pergi ke Singaraja untuk melanjutkan perjalanan ke Jawa. Namun karena kesulitan untuk memperoleh perahu dan juga karena lautan dikuasai oleh tentara Belanda, maka terpaksa Ida Bagus Tantra membatalkan

rencananya ke Jawa dan kembali ke Bali Selatan pada bulan Januari 1947. Sementara itu, kepemimpinan Wijakusuma atas MBU-DPRI Sunda Kecil tidak memperoleh persetujuan dari Gusti Ngurah Mataram yaitu satu-satunya opsir yang masih hidup. Sebagai tentara, tampaknya dia merasa lebih berhak sebagai pewaris kepemimpinan Ngurah Rai dan sesuai pula dengan kondisinya yakni dalam keadaan perang sehingga miter dianggap lebih penting perannya daripada orang sipil seperti halnya Wijakusuma menyerahkan jabatan pimpinan MBU-DPRI kepadanya. Permintaan itu ditolak oleh Wijakusuma dengan alasan:

“Perjuangan yang diemban oleh MBU-DPRI bukanlah semata-mata soal kemiliteran melainkan soal memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Ya militer, ya politik, ya sosial, ya diplomatik, ya keamanan, ya singkatnya seeluruh aspek kehidupan bangsa dan tanah air yang merdeka dan berdaulat ... bahwa perjuangan di Sunda Kecil khususnya di Bali tidak bisa disamakan dengan di Jawa... Di Bali perjuangan sudah menjadi satu dan pimpinan ada di satu tangan” (Pendit, 1977).

Mataram tampaknya menyadari hal itu, sehingga tidak ada usaha untuk merebut kepemimpinan MBU-DPRI dengan kekerasan. Selain itu, tindakan kekerasan tentu akan memecah persatuan dan menimbulkan polarisasi antara sipil-militer yang bisa akan merugikan perjuangan di Bali. Untuk menggeser kedudukan Wijakusuma secara kekerasan (paksa) belum tentu akan memperoleh dukungan dari para tokoh pejuang yang lainnya, sebab bagaimanapun juga Wijakusuma cukup disegani, tidak saja di kalangan pejuang melainkan juga di kalangan rakyat. Pertimbangan itulah tampaknya yang menyebabkan Mataram mengalah dan meninggalkan Pulau Bali untuk menuju Yogyakarta sekitar bulan Mei 1947. Kepergiannya memang sambil melaporkan perkembangan situasi di Bali dan disinilah Mataram akhirnya membentuk Resimen Sunda Kecil dengan dia sebagai komandannya yang berpangkat letnan Kolonel (Tantra, 1981).

Sementara itu pada tanggal 15 November 1946 Republik Indonesia dan Belanda berhasil merumuskan naskah persetujuan yang terkenal dengan nama Persetujuan Linggarjati. Persetujuan ini baru pada tanggal 25 Maret 1947 ditandatangani oleh kedua belah pihak di Istana Gambir Jakarta (Hatta, 1979). Adapun isinya adalah:

1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto (yang nyata) Republik Indonesia atas Jawa Madura dan Sumatera.
2. Pemerintah Indonesia dan Belanda akan mendirikan Negara Republik Serikat pada tanggal 1 Januari 1949.
3. Negara Indonesia Serikat dihubungkan dengan Belanda dalam suatu uni Indonesia-Belanda (uni = gabungan negara-negara).

Sesuai dengan isi perjanjian itu maka sebelum ditandatangani 25 Maret 1947, pemerintah Belanda mensponsori Konferensi Malindo 16-25 Juli 1946 yang kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946). Dalam Konferensi Denpasar berhasil dibentuk Negara Indonesia Timur yang nantinya akan merupakan bagian dari Negara Indonesia Serikat seperti apa yang direncanakan dalam Persetujuan Linggarjati (Agung 1985). Dalam kaitan ini maka daerah Bali yang terdiri dari daerah-daerah Swapraja Buleleng, Jembrana, Badung,

Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem yang semuanya tergabung dalam satu federasi menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (Agung, 1985).

Isi Persetujuan Linggarjati, yang secara resmi diterima oleh pemerintah republik Indonesia, ternyata menimbulkan permasalahan di kalangan para pejuang di Bali. Gejala timbul yaitu; ada yang mementingkan segi formal yuridis politis dan sebagainya yang karena Linggarjati berarti persetujuan Republik dengan NIT maka pejuang-pejuang yang berdisiplin harus mentaati Soekarno Hatta, lain juga harus menerima NIT. Aliran lain adalah yang tidak mempersoalkan mengenai lahir dan hukum mengenai disiplin terhadap problem dan revolusi sehingga NIT harus tetap dimusuhi karena bentukan ini memusuhi revolusi (Nasution, 1978).

Kelompok terdahulu di Bali dikenal dengan sebutan "Aliran Malino", sedangkan kelompok yang belakangan disebut aliran Republikein (Pendit 1977). Untuk menarik agar orang lebih banyak mengikuti Aliran Malino, atau mendukung NIT yang semakin lama terus memantapkan dirinya dalam bidang ketata negaraan dan aspek-aspek kehidupan yang lainnya, maka pemerintah Belanda membentuk Malino Beurs (Pendit, 1977). Badan ini bersifat sosial, yakni memberikan bantuan dana kepada seseorang yang mau melanjutkan sekolah ke Makassar yang merupakan ibukota dari NIT.

Dalam rangka memantapkan struktur ketatanegaraan NIT di Bali maka:

“Nica sekali mengadakan pembersihan terhadap rakyat yang berjuang untuk Republik sehingga para pejuang harus sangat berhati-hati sekali dalam gerak-geriknya, lebih-lebih karena kaki tangan musuh tetap tersebar dimana-mana. Maka keadaan kota menjadi sepi kelihatannya. Gerilya dan golongan pejuang illegal tidak terang-terang mengadakan gerakannya sehingga kota nampak aman dan tidak ada gangguan pihak gerilya lagi di kota-kota-kota. Sudah tentu NICA dalam keadaan awas dan siap” (Nasution, 1977).

Di pihak lain hubungan Bali dengan Jawa semakin sulit, bahkan Bali berhasil diputuskan dari Jawa. Sebab setelah Persetujuan Linggarjati yang diikuti oleh *Cease fire Order*, sehingga pertempuran di darat agak mereda. Dalam periode ini NICA mengerahkan seluruh kekuatan angkatan lautnya untuk memukul Republik Indonesia di bidang ekonomi dan juga untuk memutuskan komunikasi antar pulau. Secara teratur angkatan laut Belanda berpatroli di laut Jawa dan Selat Bali dengan mendatangi Pelabuhan-pelabuhan yang ada seperti Banyuwangi, Muncar, Ketapang, Probolinggo dan lain-lain (Nasution, 1970)

Dalam keadaan seperti itu, ditambah lagi dengan adanya kenyataan hancurnya kekuatan militer di Bali sebagai akibat dari “Puputan Margarana” dan juga kondisi MBU-DPRI yang belum mapan, maka perjuangan di Bali mungkin agak lambat. Aksi-aksi militer mulai semakin sulit dilaksanakan tidak saja karena keterbatasan persenjataan melainkan juga karena NICA semakin kuat cengkeramannya atas pulau Bali. Keadaan inilah yang menyebabkan Ida Bagus Tantra mendirikan MBI (Markas Besar Istimewa) pada tanggal 24 Februari 1947. Berdirinya organisasi ini, mungkin tidak bisa pula dilepaskan dari kekecewaannya karena:

“Setelah saya gagal untuk ke Jawa jabatan saya sebagai MB Tabanan sudah dipegang oleh orang lain yaitu saudara Jali dan bukan oleh wakil saya yaitu Pak Binder. Toh saya tak apa-apa. Apa tugas saya yang sebenarnya di MBU-DPRI pada waktu saya tidak tahu”

(Tantra, 1981). Tampaknya Ida Bagus Tantra menilai MBU kurang disiplin, sebab dalam rapat Buahhan sudah digariskan bahwa MB Tabanan berada di bawah pimpinannya dan selama di ke Jawa, kedudukannya diganti oleh Binder. Namun kenyataannya, MBU-DPRI tidak mematuhi. MBI yang didirikan oleh Ida Bagus Tantra, mungkin dapat dikatakan semacam kelompok tandingan dari MBU-DPRI yang mencoba mencari alternatif lain dalam perjuangan di Bali. Dalam kaitan ini, MBI diharapkan mampu menjadi kekosongan organisasi perjuangan di Bali, andaikata MBU-DPRI sebagai satu-satunya organisasi perjuangan mengalami kelumpuhan atau terpaksa dibubarkan baik karena masalah intern maupun ekstern. Di samping itu, dalam usahanya ikut mempertahankan kemerdekaan, MBI tidak saja memakai cara biasa yaitu sesuai dengan tuntutan revolusi melainkan; “Akan berusaha juga secara khusus yaitu melalui kebatinan menghubungi para dewa di dunia astral untuk mohon bantuannya. Karena itu anggota-anggotanya terdiri dari para pendeta, pemangku dasaran dan kawan-kawan yang suka berkecimpung di bidang itu” (Tantra, 1981).

Dengan demikian, meminjam pendapatnya Frozer (dikutip dari Kahoentjaraningrat, 1980) maka MBI pada dasarnya dapat dikatakan berusaha memecahkan masalah-masalah revolusi, tidak saja dengan akal dan system pengetahuan melainkan juga dengan memakai *magic* atau ilmu gaib. Karena karakteristiknya yang dinilai istimewa, itulah yang menyebabkan Ida Bagus Tantra menyebut organisasinya Markas Besar Istimewa (MBI). Dengan adanya perkembangan situasi serupa itu, yakni penerimaan pusat terhadap Persetujuan Linggarjati terbentuknya NIT dalam Konferensi Denpasar, sikap pro dan kontra terhadap NIT dan juga keadaan MBU-DPRI yang belum mapan sejak gugurnya Ngurah Rai sehingga timbul MBI maka pada tanggal 4-5 April 1947 beberapa tokoh pejuang di Bali mengadakan rapat di Banyuning. Dalam rapat ini, Wijakusuma yang semula dapat dipandang “Pimpinan Sementara” dari MBU-DPRI (Rapat Buahhan) berhasil memperoleh legitimasi terbukti dari pengangkatannya sebagai pucuk pimpinan MBU I. Adapun struktur kepemimpinannya yang lengkap adalah sebagai berikut (Pendit, 1977):

- | | | |
|-------|------------------------|----------------------------------|
| I. | Pucuk Pimpinan MBU I | : Made Wijakusuma alias Joko |
| II. | Pucuk Pimpinan MBU II | : Nyoman Mantik alias Mangkur |
| III. | Pucuk Pimpinan MBU III | : Wayan Noor Rai alias Mangku |
| IV. | Sekretaris Bendahara | : KOMPIANG SUJANA |
| V. | Ketua Bagian Siasat I | : Gusti Ngurah Mataram |
| VI. | Ketua Bagian Siasat II | : Ketut Wijana alias Item |
| VII. | Pembantu Umum I | : Ida Bagus Tantra alias Poleng |
| VIII. | Pembantu Umum II | : Jaya |
| IX. | Opsir Penghubung | : Subroto A.N alias Umbara (Sam) |

Di samping itu dalam rapat ini, berhasil pula dirumuskan program kerja atau taktik dan strategi perjuangan MBU-DPRI selanjutnya yang dikenal dengan istilah program minimum yang menetapkan antara lain:

- a. Program minimum disusun atas dasar kekuatan atau kelemahan persenjataan dan politik perjuangan pemerintah RI di Jawa yaitu:
 1. Gerakan militer pasif.

2. Perjuangan politik aktif.
 3. Penerangan ke dalam dan ke luar untuk memelihara semangat perjuangan pemuda dan rakyat serta menyatakan keluar sebagai organisasi yang masih tetap memperjuangkan RI.
 4. Persiapan-persiapan untuk memperkuat diri.
- b. Pulau Bali dibagi menjadi 3 daerah perjuangan untuk tiap-tiap daerah Perjuangan diangkat seorang perwakilan MBU. Pembagiannya adalah sebagai berikut:
1. DP (Daerah Perjuangan) I : Klungkung, Karangasem dan Bangli = Joko.
 2. DP (Daerah Perjuangan) II : Gianyar, Badung dan Tabanan = Poleng.
 3. DP (Daerah Perjuangan) III : Buleleng dan Jembrana = Mangku.
 4. Pengiriman kurir ke Jawa untuk melaporkan peristiwa perang Margarana.

Berdasarkan struktur kepengurusan MBU-DPRI itu tampaknya Ida Bagus Tantra memang didudukkan sebagai Pembantu Umum I. Kebijakan ini mungkin dimaksudkan untuk merangkul Ida Bagus Tantra agar MBI-nya dibubarkan atau tidak berfusi ke dalam MBU-DPRI sehingga kesatuan perjuangan di Bali kembali terpulihkan. Namun, karena mungkin kedudukan Pembantu Umum I kurang bergengsi atau menurut Ida Bagus Tantra (1981) bahwa “pada susunan pengurus MBU-DPRI 6 April 1947 saya menjabat Pembantu Umum I yang tidak pernah disampaikan ke saya”, sehingga apa yang diharapkan oleh MBU-DPRI akhirnya sulit untuk diwujudkan. Akibatnya polarisasi antara MBU-DPRI dengan MBI tidak dapat dielakan. Gejala inilah yang menyebabkan Wijakusuma membatalkan niatnya ke Jawa sebagai duta, sesuai dengan isi program minimum Banyuning. Sebab bagaimanapun juga, Wijakusuma mungkin khawatir bahwa kepergiannya ke Jawa tidak saja memberikan peluang bagi tergesernya kepemimpinan MBU-DPRI, melainkan juga bisa pula terjadi MBI akan mendominasi perjuangan di Bali sehingga kedudukan MBI menjadi agak melemah.

2. Taktik dan Strategi Perjuangan di Bali Pasca Puputan Margarana

a. Berbagai Tindakan Persuasif untuk Melaksanakann Program Mininum Banyuning

Berdasarkan isi program minimum Banyuning maka titik fokus kegiatan MBU-DPRI ialah gerakan militer pasif, perjuangan politik aktif dan juga memperkuat semangat rakyat serta pemuda agar tetap memperjuangkan RI. Untuk mencapai sasaran ini maka MBU-DPRI melakukan berbagai kegiatan antara lain yang bersifat persuatif. Untuk itu, MBU-DPRI mengeluarkan beberapa maklumat yang memuat seruan, perintah ataupun harapan yang ditujukan kepada para pejuang maupun rakyat. Salah satu di antara maklumat itu ialah Maklumat DPRI No.1 yang tampaknya dikeluarkan tidak lama setelah rapat MBU-DPRI di Banyuning.

MBU-DPRI menyerukan agar ada persatuan dan kesatuan antara rakyat dengan para pejuang dalam mewujudkan cita-cita revolusi. Kemudian ditekankan pula agar para pejuang membimbing rakyat agar tetap setia pada revolusi, tidak saja dengan kata-kata melainkan yang lebih penting ialah lewat laksana. Akhirnya yang tidak kalah pentingnya ialah para pejuang dan rakyat harus menghargai dan patuh kepada pemimpinnya yang tercermin dari kata dan perbuatannya.

Selanjutnya dalam Maklumar DPRI No.2 ditekankan pula bahwa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan maka, "... Segala perbedaan paham dan pendirian, hal perorangan (*persoonlijke kwestied*) dan lain-lain harus disingkirkan benar-benar dengan pedoman: "Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi" Sekali Merdeka tetap Merdeka". Kemudian untuk melancarkan jalannya revolusi, maka bantuan rakyat sangat diperlukan tidak saja berbentuk tenaga tetapi juga dalam bentuk barang. Dalam kaitan ini maka dalam Maklumat DPRI No.3 antara lain diserukan bahwa "Sumbangan badan-badan perjuangan dari kampung-kampung kepada DPRI yang berupa pakaian, uang, maupun barang lainnya hendaknya diserahkan kepada suatu penghubung tetap...".

Masalah bantuan dalam revolusi Fisik memang sangat penting sebab dari bantuan itulah para pejuang dapat menghidupi dirinya atau melanjutkan perjuangan. Khusus dalam kaitannya dengan dana revolusi, setelah Puputan Margarana tampaknya merupakan salah satu sumbu kendala yang tidak kalah pentingnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa dana revolusi dalam bentuk persediaan uang perak yang dikelola MBU (Ngurah Rai) kemudian disembunyikan di Carangsari, berhasil dirampas oleh NICA sehingga modal perjuangan menjadi ludes (Tantra, 1981).

Untuk mengetahui dana MBU-DPRI kemudian mengeluarkan instruksi untuk mengadakan pinjaman dari rakyat dalam bentuk obligasi. Di sinilah tampaknya instruksi itu diolah lagi oleh MBI, seperti apa yang dikatakan oleh Ida Bagus Tantra (1981) yaitu, "Instruksi ini saya mendengarkan dengan staf saya dan memutuskan tidak mengadakan obligasi dengan alasan, yaitu; (1) segala sesuatu yang diperlukan oleh para pejuang sudah diselenggarakan oleh rakyat pejuang itu sendiri dan kita tidak membutuhkan membawa uang besar kemari. Kalau ada yang menawarkan senjata api yang kita butuhkan rakyat pulalah yang akan menyiapkan uangnya; dan (2) kemudian kalau sudah merdeka mungkin sulit sekali untuk mengembalikannya. Khawatir kalau tidak dipenuhi akan bisa timbul reaksi dari rakyat yang tidak menguntungkan kita."Sebab itulah, di daerah Bali Selatan tidak diadakan obligasi (Tantra, 1981).

Meskipun dalam jaman Revolusi, rakyat diharapkan menyumbangkan dana dan daya yang dimilikinya namun kenyataannya, tidak menutup pula kemungkinan ada warga masyarakat yang kurang berpartisipasi baik karena ketidakpahaman akan makna revolusi maupun karena sikapnya yang masa bodoh. Sesuai dengan program minimum Banyuning yaitu perjuangan politik aktif maka warga masyarakat seperti ini terus digarap oleh para pejuang yakni melalui penerangan-penerangan mempengaruhi dan mengendalikan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat sehingga rakyat lebih mudah mengikutinya. Tokoh-tokoh masyarakat itu banyak yang didudukkan dalam Markas Ranting DPRI yang bertebaran pada setiap desa. Markas-markas ranting ini, bisa tumbuh atas inisiatif dari bawah atau di bentuk atas inisiatif para pejuang. Namun bagaimanapun juga orang-orang yang duduk dalam kepengurusannya, mereka yang dianggap sebagai tokoh masyarakat dan loyalitasnya kepada revolusi tidak diragukan lagi.

Pada saat tertentu, apabila tentara NICA mengedorkan tekanannya terhadap para gerilya mereka bisa bebas ke luar masuk desa. Mereka pada siang hari berkeliaran di desa-desa dengan pakaian necis mereka duduk-duduk di warung minum kopi sambil merokok sambil ngobrol (Tirtayasa, 1985) sehingga dekat dengan rakyat. Pada daerah-daerah yang benar aman para gerilya bisa tinggal lama. Demikian misalnya; “Pak I Ketut Polos dan staf MBO, dan Bapak Putu Windia Wirawan anggota MB Buleleng mereka berbulan-bulan bermukim di Gesing karena daerah itu betul-betul aman dan terjamin. Justru dalam keadaan aman dan tentram itu, sempat Pak Putu Windia menggait seorang perempuan dari Sulanyah kemudian menjadi istrinya” (Tirtayasa, 1985).

3. Infiltrasi Pengaruh DPRI Terhadap Organ-Organ Pemerintah

Untuk menghindarkan diri dari jaman tangan, kaki dan telinga para organ pemerintah, maka salah satu cara yang bisa ditempuh adalah mengadakan infiltrasi atau menanamkan pengaruh secara diam-diam di kalangan organ pemerintah sehingga mereka mengendorkan kontrol sosialnya atau kalau memungkinkan mau mendukung perjuangan para gerilya baik dalam bentuk dukungan moril maupun material. Dalam kaitan ini, dibentuklah dinas rahasia MBU-DPRI yang operasinya dikoordinir oleh setiap MB. Di Buleleng misalnya pada tahun 1947 dibentuklah GRR (Gerakan Rahasia Rakyat Indonesia) yang pada dasarnya adalah reorganisasi terhadap UGO (*Underground Organization*) yang dipimpin oleh Ketut Wijana yang didirikan tahun 1946. Salah satu seksi dari GRR ialah Kolonel V yang memiliki misi khusus yakni berusaha mengadakan penyusupan ke daerah musuh ke tangsi NICA atau Polisi dan mempengaruhi pejabat-pejabat musuh.

Dengan cara-cara persuatif, bahkan dapat pula memakai wanita sebagai umpan. Colonel V berhasil mengembangkan jaringan kerja yang luas di kalangan para pegawai pemerintah. Suatu misal ialah banyak polisi yang berhasil dirangkul oleh Kolonel V seperti Nyoman Seregeg dari Liligundi, Nengah Cawi dari Mayong dan lain-lain. Bahkan jumlah mereka mencapai sekitar 100 orang anggota polisi NICA. Hubungan rahasia itu tentu sangat membantu perjuangan para gerilya terbukti misalnya; “... waktu Pak Item dipanggil oleh Pak Joko di daerah Selatan (Badung) Pak Item dengan mudah memanggil seorang anggota polisi yang menjadi sopir raja Buleleng I Gusti Ngurah Bom... Dengan pakaian uniform polisi NICA, sopir telah mengangkutnya ke Denpasar melalui Kintamani. Pos-pos NICA di jalan mendelik melihat orang yang ada di dalamnya. Walaupun curiga, tetapi NICA tidak bisa berbuat apa-apa karena yang dikendarai adalah mobil raja dan sopirnya seorang polisi berseragam” (Tirtayasa, 1985).

Kemudian, ada pula di antara polisi tersebut yang secara tersembunyi memberikan perlakuan yang baik kepada para gerilya yang berhasil di tawan bahkan bisa juga memberikan peluang untuk melarikan diri yang sudah tentunya perbuatan seperti penuh dengan resiko. Selain itu tentara pun banyak yang berhasil dipengaruhi oleh Kolonel V. Suatu misal ialah membantu para gerilya dengan menyelundupkan ke luar tangsi berbagai perlengkapan militer seperti peluru geranat tangan dan lain-lain. Perlengkapan itu, bisa diambilkan dari jatah dinas atau pula melalui usaha mencuri dari gudang persenjataan tentara NICA.

Di MB Badung terdapat pula dinas rahasia yaitu UGI (*Undeground Istimewa*). Organisasi ini, kemudian dilebur menjadi MKP (Markas Kota Pusat) atas inisiatif Wijakusuma. Salah seorang pemimpin MKP ialah Gede Puger. Sama halnya dengan GRRI, maka MKP tampak berusaha menjalin hubungan kerjasama secara rahasia dengan para pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh penting terutama sekali di daerah perkotaan dimana lewat kegiatan tersebut diharapkan banyak memperoleh manfaat untuk kelangsungan cita-cita perjuangannya.

Usaha-usaha lain dari kalangan pemuda gerilya ialah mempengaruhi anggota Paruman Agung terutama sekali Majelis Rakyat dan juga dewan perwakilan swapraja yang disebut Paruman Negara. Namun kegiatan ini tercium oleh para raja di Bali, sehingga mereka akhirnya mengeluarkan pernyataan di Tampaksiring dan Denpasar pada tanggal 9 Juni 1947. Dalam pernyataan itu, antara lain dilontarkan tuduhan tentang menyusupnya pengaruh para gerilya ke dalam badan-badan tersebut terutama sekali di daerah Badung dan Buleleng. Sebagai tindak lanjut kecurigaan dan pernyataan itu, maka pemilihan para anggota untuk badan-badan tersebut dibatalkan untuk daerah Badung dan Buleleng. Sedangkan untuk daerah lain ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Selain itu, para pemimpin yang bermukim di kota ikut pula berjuang secara legal dengan mendirikan sebuah partai yaitu PARINDO (Partai Rakyat Indonesia). Partai ini didirikan oleh I Gusti Putu Merta, dr. Suwarno, Paneca, dan lain-lain pada tanggal 8 Desember 1946. Partai ini tampaknya secara rahasia memiliki hubungan dengan DPRI atau para gerilya.

4. Berbagai Tindakan Kekerasan

Dalam rangka melaksanakan program minimum Banyuning, sebenarnya tidak saja ditempuh cara-cara persuasif melainkan dilakukan pula lewat berbagai tindakan kekerasan seperti terror, intimidasi, penculikan meracuni dan pembunuhan (*deberesi*) atau pembakaran. Aksi-aksi seperti ini tampaknya cukup banyak terjadi. Dalam jangka waktu setahun yaitu antara tahun 1946-1947 misalnya, menurut catatan pihak Belanda katanya ada sekitar 1.200 orang yang dibereskan (dibunuh). Sedangkan selama 20 hari saja yaitu dari tanggal 1-20 Agustus 1947 tercatat 30 pembunuhan, 6 pembakaran, belum terhitung lagi beberapa kali penculikan yang tidak jelas pelaku atau kesudahannya (Nasution, 1978).

Tindakan-tindakan kekerasan serupa itu juga dikoordinir oleh setiap MB yaitu bagian dinas rahasianya. Di MB Buleleng kegiatan itu dikoordinir oleh GRRI dengan seksi-seksinya yaitu:

1. Penyelidik mengadakan penyelidikan ke luar maupun ke dalam. Ke luar berkaitan dengan warga masyarakat sendiri sehingga jelas dapat diketahui kedudukan mereka yaitu mana lawan atau mana kawan atau siapa orang kita dan siapa bukan orang kita karena dia memihak republik atau memusuhi republik (mengekor NICA). Sedangkan ke dalam, yaitu menyelidiki perilaku para gerilya sendiri baik menyangkut ketaatan mereka dalam mengikuti garis-garis komando DPRI maupun kemungkinan mereka berperan ganda yakni memihak republik dan sekaligus juga memihak NICA atau yang paling ditakuti oleh mereka adalah antek-antek NICA kemudian menyusup ke dalam tubuh gerilya sambil menggerogoti dari dalam.

2. *Bartoset* (Barisan Topeng Setan) yaitu bertugas untuk mengadakan intimidasi kepada musuh, mata-mata musuh atau warga masyarakat yang dicurigai memihak NICA. Tindakan itu umumnya dilakukan pada malam hari. Petugasnya memakai baju putih atau pakaian hitam bertopeng sehingga disebut *bartoset*. Kegiatan intimidasi yang dilakukan oleh *bartoset* mulai dari membayang-bayangi lawan sehingga ketakutan, melempari rumahnya, diculik lalu dipaksa agar merubah perilaku bahkan tidak menutupi pula kemungkinan bahwa mereka yang dosanya besar terpaksa “dibereskan”. Bisa pula mereka melakukan intimidasi dengan memakai tipu muslihat yaitu memasuki desa-desa tertentu dengan membawa tahanan yang tangannya diikat, dipoles dengan darah-darah ayam, padahal tahanan itu adalah kawannya sendiri. Jadi mereka hanya sekedar main drama yaitu untuk memperlihatkan bahwa mereka adalah hebat sehingga mampu menawan mata-mata atau musuh dan sekaligus juga menakut-nakuti warga masyarakat agar tidak memihak kepada lawan. Sebab mereka yang memihak musuh akan memperoleh sanksi keras sebagaimana dipertontonkannya lewat “tawanan” yang diikatnya.
3. *Konock Ploeg* bertugas melakukan serangan-serangan terbuka atau tersembunyi kepada NICA. Serangan terbuka menimbulkan adanya kontak senjata sedangkan serangan tersembunyi adalah menyerang atau memberondong musuh kemudian menghilang sehingga peperangan terelakkan dan korban hanya ada di pihak musuh.
4. *Fluister Komp* bertugas menyebarkan isu-isu bohong atau yang bisa menyesatkan dan menggelisahkan musuh maupun mata-mata. Dengan menyebarkan isu-isu itu mereka misalnya lebih mudah melakukan mobilitas geografis atau melaksanakan berbagai program yang telah dirancangnya.

Mereka yang dikenai tindakan kekerasan ialah orang-orang yang nyata-nyata memihak NICA terutama sekali sebagai mata-mata. Kegiatan mereka dinilai sangat merugikan perjuangan sebab dengan aktivitas yang dilakukannya misalnya ke luar masuk pekarangan rumah orang dengan alasan membeli sapi atau kemiri mereka sebenarnya mengumpulkan informasi tentang polisi para gerilya atau rakyat yang mendukungnya kemudian melaporkannya kepada agennya atau langsung kepada NICA yang terdekat. Karena hebatnya jaringan kerja mata-mata itu, di Tabanan Barat misalnya para pejuang: “... Terpaksa mengeram di dalam perlindungan hanya di waktu malam saja berani keluar setelah mendapat isyarat dari rakyat bahwa keadaan sudah aman. Bahkan ... ada pemimpin yang setiap harinya berada di dalam perlindungan sampai 18 jam sehingga mukanya terlihat pucat pasi kehijau-hijauan karena tidak pernah kena sinar matahari” (Tantra, 1981).

Dengan adanya kenyataan seperti itulah, maka para gerilya setelah mengambil tindakan tegas kepada mata-mata. Suatu misal ialah di daerah MB Badung pembasmian mata-mata musuh dilakukan tanpa memilih bulu, apakah wanita, apakah laki-laki, apakah jenis teri atau kakap asalkan tertangkap pastilah dibunuh. Kemudian di Buleleng banyak pula mata-mata yang dihukum mati. Banyak mata-mata musuh yang dibunuh lalu mayatnya dipamerkan di depan umum. Dalam keadaan serupa ini rakyat tidak berani keluar rumah takut kalau-kalau pemuda salah alamat (Tirtayasa, 1994)

Kesimpulan

Pertempuran Margarana yang terjadi tanggal 20 November 1946 merupakan aksi heroik dan dianggap sebagai peristiwa besar, sebab seluruh pejuang di Bali dan rakyat pada umumnya melakukan perlawanan total terhadap tantara NICA sampai seluruh pasukan gugur termasuk Letkol I Gusti Ngurah Rai. Gugurnya pimpinan MBO menyebabkan pasukan gerilya di Bali mengalami kesedihan yang mendalam dan menyebabkan pula perubahan strategi dalam perjuangan melawan NICA. Taktik dan Strategi Perjuangan di Bali Pasca Puputan Margarana adalah Reorganisasi terhadap MBU-DPRI dan lahirnya MBI. Dalam rapat di Banyuning diputuskan Wijakusuma yang ditunjuk sebagai pimpinan sementara, Berbagai Tindakan Persuasif Untuk Melaksanakann Program Mininum Banyuning program minimum Banyuning maka titik fokus kegiatan MBU-DPRI ialah gerakan militer pasif, perjuangan politik aktif dan juga memperkuat semangat rakyat serta pemuda agar tetap memperjuangkan RI. Untuk menghindarkan diri dari jamahan tangan, kaki dan telinga para organ pemerintah, maka salah satu cara yang bisa ditempuh adalah mengadakan infiltrasi atau menanamkan pengaruh secara diam-diam di kalangan organ pemerintah sehingga mereka mengendorkan kontrol sosialnya atau kalau memungkinkan mau mendukung perjuangan para gerilya baik dalam bentuk dukungan moril maupun material. Dalam kaitan ini, dibentuklah dinas rahasia MBU-DPRI yang operasinya dikoordinir oleh setiap MB. Di Buleleng misalnya pada tahun 1947 dibentuklah GRRI (Gerakan Rahasia Rakyat Indonesia) yang pada dasarnya adalah reorganisasi terhadap UGO (*Underground Organization*) yang dipimpin oleh Ketut Wijana yang didirikan tahun 1946. Salah satu seksi dari GRRI ialah Kolonel V yang memiliki misi khusus yakni berusaha mengadakan penyusupan ke daerah musuh ke tangsi NICA atau Polisi dan mempengaruhi pejabat-pejabat musuh. Dalam rangka melaksanakan program minimum Banyuning, sebenarnya tidak saja ditempuh cara-cara persuatif melainkan dilakukan pula lewat berbagai tindakan kekerasan seperti terror, intimidasi, penculikan meracuni dan pembunuhan (*deberesi*) atau pembakaran.

Daftar Rujukan

- Agung, I. A. A. G. (1985a). *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Gajah Mada University Press.
- Agung, I. A. A. G. (1985b). *Renville*. Surabaya: Sinar Harapan.
- Anis, M., Ramazan, R., Prasetyo, O., Nuryanti, R., Safitri, I., Mauladi, W., ... & Rahayu, M. (2023). Identifikasi Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 7(2), 86-106. <https://doi.org/10.29408/fhs.v7i2.19747>.
- Ardhana, I. (2013). Pandangan Lokal Versus Barat Tentang Puputan Badung: Ekspansi Imperialisme Modern Belanda dalam Konteks Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 3(01), 65-86. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15696>.
- Arta, S. (2015). *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Orde Baru*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Ayuningtyas, D. R., Suharso, R., & Sodik, I. (2016). Perjuangan panglima besar jenderal soedirman pada masa revolusi fisik tahun 1945-1950. *Journal of Indonesian History*, 5(1), 10-17. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/19720>.
- Hatta, M. (1979). *Mohammad Hatta Memoir*. Tinta Emas.
- Kutoyo, S., Gonggong, A., Safwan, M., Masjkuri., Surachman., Ibrahim, M., Sutjiatiningsih, S. (1980). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali*. Denpasar: Depdikbud.
- Nasution, A. H. (1970). *Tentara Nasional Indonesia Jilid III*. Denpasar: Serulling Mas.
- Nasution, A. H. (1977). *Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Jilid I, II dan III*. Bandung: Angkasa.
- Nasution, A. H. (1978). *Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Jilid VII*. Bandung: Angkasa.
- Nugroho, A. S. dan J. I. (2011). *Detik-detik Proklamasi Saat-saat Menegangkan Menjelang Kemerdekaan Republik* (p. ix). Buku Seru.
- Pendit, N. S. (1977). *Bali Berjuang*. Surabaya: Gunung Agung.
- Ricklefs, H. C. (1992). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tantra, I. B. (1981). *Tanggapan Terhadap Buku Bali Berjuang*. Tanpa Penerbit.
- Tirtayasa, I. G. B. M. (1985). *Perjuangan Bali Periode 1945-1950*. Tanpa Penerbit.
- Tirtayasa, I. G. B. M. (1994). *Bergerilya Bersama Ngurah Rai*. Denpasar: Bali Post.